
SIARAN PERS

NOMOR: HM.02.07/7/2024

Jakarta, 28 Mei 2024

tentang

Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Samarinda – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023. Rapat koordinasi tersebut membahas isu terkait percepatan pencapaian kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab ANRI, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta Badan Usaha Milik Negara.

Pada laporan kegiatan, Sekretaris Utama, Rini Agustiani menyampaikan bahwa evaluasi juga difokuskan pada pembinaan kearsipan. “Penekanan pada pengarusutamaan program pembinaan kearsipan nasional yang meliputi Tertib Arsip, Transformasi Digital, dan Memori Kolektif Bangsa melalui sinergitas program pembinaan dan pengawasan kearsipan,” jelasnya.

Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto saat membuka acara menyampaikan bahwa program dan kegiatan kearsipan harus dijamin dapat dijalankan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Pengawasan sangat penting untuk evaluasi yang nantinya berguna untuk melihat kekurangan dan kemudian untuk memperbaiki berikutnya. “Tidak ada lagi kegiatan kearsipan yang tidak terencana. Oleh karena itu, pertemuan kita kali ini di Kaltim, Samarinda juga akan membahas bagaimana perencanaan kita di lima tahun ke depan di tahun 2025-2029,” jelas Imam Gunarto.

Imam menambahkan, data pengawasan tahun 2023 menunjukkan masih adanya beberapa kinerja kearsipan nasional dari lembaga pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang belum mencapai target dengan baik. Sementara itu, target kearsipan untuk tahun 2025-2029 tentunya akan bergeser dan lebih diarahkan kepada *big archive*, yaitu ke arah pembangunan yang terkait dengan *big data* kearsipan sebagai pusat khazanah dan pembelajaran bangsa secara digital.

Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat

Jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan dengan kategori:

1. AA (Sangat Memuaskan) sebanyak 34 atau 40,5%;
2. A (Memuaskan) sebanyak 20 atau 23,8%;

3. BB (Sangat Baik) sebanyak 18 atau 21,4%;
4. B (Baik) sebanyak 9 atau 10,7%;
5. CC (Cukup) sebanyak 2 atau 2,4%;
6. C (Kurang) sebanyak 1 atau 1,2%.

Selain itu, terdapat dua lembaga yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal dan tidak memenuhi komponen nilai hasil pengawasan kearsipan sehingga "Tidak Diberikan Kategori".

Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi

Jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan dengan kategori:

1. AA (Sangat Memuaskan) sebanyak 6 atau 17,65%;
2. A (Memuaskan) sebanyak 4 atau 11,76%;
3. BB (Sangat Baik) sebanyak 10 atau 29,41%;
4. B (Baik) sebanyak 8 atau 23,53%;
5. C (Kurang) sebanyak 5 atau 14,71%;

Sementara itu, pemerintah provinsi yang memperoleh penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan Tidak Diberikan Kategori sebanyak 1 atau 2,94%.

Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan dengan kategori:

1. AA (Sangat Memuaskan) sebanyak 12 atau 2,36%;
2. A (Memuaskan) sebanyak 47 atau 9,25%;
3. BB (Sangat Baik) sebanyak 62 atau 12,20%;
4. B (Baik) sebanyak 59;
5. CC (Cukup) sebanyak 42 atau 11,61%;
6. C (Kurang) sebanyak 66 atau 8,27%;
7. D (Sangat Kurang) adalah sebanyak 13 atau 2,56%.

Adapun pemerintah kabupaten/kota yang tidak diberikan opini karena tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan adalah sebanyak 65 atau 12,80%, serta pemerintah kabupaten/kota yang tidak diberikan kategori karena tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal adalah sebanyak 142 atau 27,95%.

Bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, ANRI juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Statis dan Memori Kolektif Bangsa, penyerahan sertifikat akreditasi kearsipan kepada empat instansi, serta Pameran *One Stop Service* yang diikuti unit kerja di lingkungan ANRI dan Pameran Arsip Statis "Pindah dari Jakarta ke Nusantara" yang diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Kota Jakarta ke Kota Nusantara. Pameran arsip statis ini mengandung alur cerita bagaimana ibu kota mulai zaman Hindia Belanda, kota yang pernah menjadi ibu kota negara, wacana pemindahan ibu kota negara, hingga perpindahan ibu kota dari Jakarta ke

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-3-

Ibu Kota Nusantara. Arsip yang dipamerkan terdiri atas 37 arsip, dengan rincian arsip tekstual sebanyak 18 arsip, arsip foto sebanyak 12 arsip, arsip kartografi sebanyak 6 arsip, dan arsip video 1 arsip. ***

}{ttd}

Informasi lebih lanjut hubungi:
Biro Perencanaan dan Humas ANRI
Email: humas@anri.go.id